**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KETENTUAN
PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Rahmat Hidayat¹, Davit Rahmadan², Erdianto Effendi³

rahmat.hidayat3225@student.unri.ac.id¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²,

erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract

Sexual violence is a crime that has affected the lives of many people throughout history and today. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) brings significant reforms in the Indonesian criminal justice system, one of which is the qualification of physical evidence as part of legal evidence in Article 24. This research examines the application of Article 24 of the UU TPKS in court decisions, particularly in the Pekanbaru District Court Decision No.46/Pid./B/2022/PN.PBR. This research uses a normative juridical method with a systematic legal approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 12 of 2022. Secondary legal materials include legal literature, court decisions, and academic writings. Data analysis is conducted qualitatively with deductive conclusions. The research findings show that despite the existence of evidence and physical evidence presented at trial, including lie detector test results, language expert testimony, and forensic psychological examination results, the judge still did not apply Article 24 of the UU TPKS to convict the defendant. In the case decision No.46/Pid.B/2022/PN.PBR, the defendant was acquitted even though the evidence met the elements of sexual violence crimes. This contrasts with two other cases (Decision No. 74/Pid.B/2023/PN Lbs and No. 470/Pid.Sus/2023/PN Prb) where judges used physical evidence as part of legal evidence according to the UU TPKS. The conclusion of this research is that the application of Article 24 of the UU TPKS has not been consistent in judicial practice. Some judges still do not use physical evidence as part of legal evidence, resulting in difficulties in proving sexual violence crimes. It is recommended that law enforcement officials maximize the use of the UU TPKS to obtain conviction from physical evidence presented in sexual violence criminal cases.

Keywords : *Criminal Acts, Sexual Violence, Evidence, Physical Evidence.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Barang-barang bukti seperti narkotika/psikotropika yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan

senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti penting tentang kesalahan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) salah satu hal yang diapresiasi sekaligus menambah catatan perbaikan reformasi peradilan pidana adalah dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai bagian dari Alat Bukti yang Sah dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 24 ayat (1) UU TPKS). Pembuktian sebagai salah satu bagian dari sentral hukum acara pidana, dimaksudkan untuk memberikan sebanyak mungkin bukti-bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana atau perkara.

Dalam beberapa putusan pengadilan, ditemukan fakta bahwa hakim telah menggunakan barang bukti sebagai alat bukti contohnya pada Putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr, Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs, Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Prb. Perluasan barang bukti menjadi alat bukti justru mempermudah hakim dalam membuktikan bersalahnya terdakwa. Namun satu dari tiga kasus yang diadili salah satunya divonis bebas, padahal alat bukti dan barang bukti sudah ada yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr.

Pada putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr tersebut telah ditemukan barang bukti yaitu satu helai baju kaos kerah putih bercampur warna ungu dan hijau, satu helai celana jeans berwarna biru muda, satu buah asli kartu tanda mahasiswa atas nama LAMANDA, satu lembar kartu rencana studi atas nama LAMANDA, satu unit handphone merk Iphone, satu kartu SIM, satu unit handphone merk samsung, surat keputusan Pengangkatan sebagai dekan Fisip UNRI atas nama Dr. SYAFRI HARTO, M.Si. Yang mana terlihat jelas dari bukti-bukti tersebut memberikan klimaks bahwasanya sang pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

METODE

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum sekunder atau penelitian menurut aturan-aturan standar yang sudah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru NO.46/Pid./B/2022/PN.PBR

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaporan Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan ada 5, yaitu:

1. Pelecehan Fisik
2. Pelecehan Lisan
3. Pelecehan non-verbal/isyarat
4. Pelecehan visual
5. Pelecehan psikologis/emosional

Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Ringkasan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru NO.46/Pid./B/2022/PN.PBR

- a. Korban merupakan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (UNRI);
- b. Terdakwa merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI, dan atas penunjukan oleh ketua jurusan terdakwa ditunjuk sebagai pembimbing skripsi dari korban;
- c. Awalnya korban berkomunikasi dengan terdakwa untuk mendiskusikan jadwal bimbingan skripsi;

- d. Jadwal bimbingan skripsi terdakwa dengan korban pada hari Selasa dan Jumat, namun pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 janji untuk hari Rabu, hari Rabu tidak Bertemu, kemudian janji pada hari Jumat juga tidak terlaksana karena kendala sehingga bertemu pada hari Rabu siang berikutnya;
- e. Terdakwa meminta foto korban karena korban mengatakan dari Taluk Kuantan, mana tahu terdakwa mengenal korban;
- f. Pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB korban bertemu dan mengenal terdakwa untuk pertama kalinya pada kantor dekan untuk bimbingan proposal skripsi korban menemui terdakwa pada ruangan melalui staf;
- g. Pada ruangan tersebut hanya terdapat korban dan terdakwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan staf dekan yang menyatakan bahwa staf terdakwa tidak mengetahui korban keluar ruangan karena staf dekan sedang pesan makanan;
- h. Sekretaris terdakwa bolak-balik pada ruangan terdakwa saat rapat pimpinan, yang pada saat itu korban belum di ruangan;
- i. Pada awal bimbingan terdakwa menanyakan mengenai keluarga dan pekerjaan korban, kemudian terdakwa meminta proposal skripsi dan membaca judul skripsi, terdakwa mengatakan "kenapa judulnya begini?" dan saksi mengatakan bahwa telah diperbaiki oleh pak afrizal selaku Sekretaris Jurusan;
- j. Korban menceritakan mengenai keluarga dan terdakwa menyuruh saksi mengambil air minum di ruangannya;
- k. Terdakwa menyatakan bahwa hipotesis skripsi bukan begitu dan referensinya kurang dan menyatakan bahwa bimbingan satu kali saja langsung seminar proposal, sehingga korban senang;
- l. Pada akhir sesi bimbingan korban selaku mahasiswa menanyakan apa boleh salim untuk pamit pulang, terdakwa mengatakan jangankan salim yang lain juga boleh, salim merupakan kebiasaan korban apalagi terdakwa sebagai dosen merupakan orang tua yang ada pada kampus;
- m. Korban salim memegang tangan terdakwa, kemudian terdakwa maju menggenggam kepala saksi langsung mencium pipi kiri dan kening korban dan mengatakan "mana bibir, mana bibir".
- n. Korban merasa takut sehingga menundukkan kepala namun terdakwa mendongakan kepala korban, korban lemas dan mendorong perut terdakwa mengatakan tidak mau yang kemudian dijawab terdakwa yaudah kalau tidak mau;
- o. Terdakwa mengatakan "I Love You" kepada korban sebanyak dua kali sehingga karena terdakwa merupakan dosen dari korban, korban merasa risih, tidak nyaman sehingga korban pergi keluar meninggalkan terdakwa;
- p. Setelah kejadian tersebut korban langsung pergi meninggalkan kantor dekan karena korban merasakan ketakutan luar biasa dan syok sehingga badan korban lemas setelah kejadian tersebut;
- q. Korban melaporkan kejadian tersebut pada Afrizal selaku Sekretaris Jurusan HI untuk meminta penggantian pembimbing skripsi dan pada tanggal 28 Oktober 2021 laporan tersebut di follow up kembali oleh korban namun belum ada tindak lanjut karena pada saat itu Sekretaris Jurusan sedang mengajar;
- r. Pada tanggal 29 Oktober 2021 korban menanyakan kembali kepada Sekretaris Jurusan atas laporannya, Afrizal selaku Sekretaris Jurusan meminta korban menemui terdakwa, namun korban menolak karena masih ketakutan;
- s. Korban bersama Afrizal menemui Tri Joko Waluyo di rumah Kepala Jurusan HI untuk mendiskusikan laporan tersebut. Tri Joko Waluyo mengakui atas laporan korban pada 29 Oktober 2021 atas perbuatan tidak senonoh oleh dekan pada saat bimbingan. Tri Joko Waluyo membenarkan bahwa korban meminta pergantian dosen pembimbing, dan terdakwa tidak menyangkal atas keterangan Tri Joko Waluyo tersebut;

- t. Pasca kejadian, Tri Joko Waluyo menyampaikan bahwa dirinya pernah ditelepon oleh terdakwa untuk dapat memanggil dan mempertemukan dirinya dengan korban;
- u. Perbuatan terdakwa telah dikonfirmasi dalam persidangan dengan keterangan ahli polygraph, Aji Fibrianto Arrosyid, S.T. Pada tanggal 13 November 2021 terdakwa ditanya dengan pertanyaan "apakah anda mencium wajah korban?" apakah anda mencium wajah korban di ruangan kerja anda?" "Apakah anda mencium wajah korban pada rabu kejadian?" atas semua pertanyaan tersebut terdakwa menjawab "Tidak", namun Lie Detector menunjukkan peningkatan detak jantung yang mengindikasikan terdakwa berbohong;
- v. Berdasarkan keterangan ahli bahasa Wawan Prihartono, S.S., M. Hum menyampaikan pendapatnya bahwa berdasarkan screenshot (tangkapan layar) WhatsApp terdakwa yang mengatakan "Alhamdulillah, kirim fotonya ke bpk, mana tahu bapak kenal" kepada korban merupakan tindakan berlebihan yang dilatarbelakangi oleh orientasi seksualitas;
- w. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensic No. 050/Psi-YA/XI/2021 yang dibuat oleh Yanar Arief M.Psi pada tanggal 17 November 2021 pada bagian kesimpulan menyebutkan bahwa dapat dan patut diduga peristiwa pelecehan seksual pada korban memang terjadi, karena korban memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan, korban memiliki kepribadian yang spontanitas, lugu dan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa sehingga rentan untuk dilakukan perbuatan pelecehan seksual, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami depresi berat;
- x. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair Pasal 289 KUHP, subsidair Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, dan lebih subsidair Pasal 281 ke-2 KUHP, terdakwa dituntut penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pembayaran restitusi sebesar Rp. 10.722.000;
- y. Berdasarkan Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair penuntut umum, atas putusan tersebut terdakwa dibebaskan dan mengeluarkan penuntut umum dari tahanan.

Kasus Lainnya:

Kasus 1 P U T U S A N Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan meraba-raba pantat korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat korban. Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS.

Kasus 2 P U T U S A N Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Prb

Terdakwa ANDREAS GINTING terbukti melakukan kekerasan seksual beberapa kali terhadap siswi SMA. Terdakwa divonis 10 tahun penjara dan denda Rp20.000.000,00 berdasarkan Pasal 12 Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pembuktian pelecehan seksual dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah mengkualifikasikan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah.

Dimana dalam kasus Putusan No.46/Pid./B/2022/PN.Pbr Korban sudah mengajukan Alat Bukti sebagai berikut:

1. Keterangan ahli polygraph, Aji Fibrianto Arrosyid, S.T. yang mengindikasikan terdakwa berbohong.
2. Keterangan ahli bahasa Wawan Prihartono, S.S., M. Hum yang menyatakan tindakan terdakwa berlebihan dan dilatarbelakangi orientasi seksualitas.
3. Hasil pemeriksaan psikologi forensic yang menyimpulkan dapat dan patut diduga peristiwa pelecehan seksual pada korban memang terjadi.
4. Barang bukti berupa: pakaian korban, kartu mahasiswa, proposal skripsi, handphone,

dan surat keputusan pengangkatan dekan.

Berdasarkan pada pemaparan alat bukti dan barang bukti yang diatas dan juga pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ayat 1: "Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya" sudah cukup bagi hakim untuk memutus bersalah terdakwa.

B. Pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa dalam kasus putusan pengadilan nomor 46/Pid.B/2022/PN.PBR

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun penuntut umum telah menghadirkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi terhadap keterangan saksi Lamanda yang menerangkan bahwa terdakwa telah mencium pipi, kening dan mencoba mencium bibir saksi lamanda tidak didukung oleh saksi lainnya, karena saksi lain selain Lamanda, tahu hal tersebut dari saksi Lamanda sendiri (testimonium de auditu), sehingga tidak ada nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut (the degree of evidence);
2. Bahwa nilai pembuktian saksi yang diajukan Penuntut umum, masing masing berdiri sendiri sendiri, tidak bisa dikaitkan dengan keterangan saksi Lamanda, karena memiliki kualitas yang berbeda, sehingga tidak bisa dikategorikan kepada rangkaian dalam terjadinya delict;
3. Bahwa berkaitan dengan norma Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010, menurut majelis tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo karena terdapat perbedaan karakter antara Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan perkara a quo, selain itu batasan relevansi serta cakupan perluasan definisi saksi dan keterangan saksi belum dijelaskan secara pasti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda atau multitafsir antara aparat penegak hukum dalam beracara pidana;
4. Bahwa keterangan saksi yang diperlukan majelis dalam sidang yang digunakan untuk membentuk keyakinannya adalah semua keterangan saksi yang menyangkut hal keadaan bathin terdakwa sebelum berbuat, seperti kehendak atau niat terdakwa;
5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang adanya ketidak konsistennya keterangan saksi Lamanda, sehingga dengan tidak konsistennya keterangan saksi Lamanda, menjadi dasar Keyakinan Hakim dalam perkara a quo;
6. Bahwa keyakinan Hakim yang bersumber dari nurani Hakim perkara a quo didasarkan pada argumentasi logis atas fakta-fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan penilaian terhadap kekuatan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang diintegrasikan dengan pemahaman terhadap berbagai aspek keilmuan baik ilmu hukum maupun dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
7. Bahwa Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berkesimpulan unsur pokok melanggar kesusilaan tidak terpenuhi;
9. Bahwa oleh karena unsur melanggar kesusilaan tidak terpenuhi, maka Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;
10. Bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Lebih

- Subsida, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsida tersebut;
11. Bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan Prima, dakwaan Subsida, dakwaan Lebih subsida, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Prima, dakwaan Subsida, dakwaan Lebih Subsida;
 12. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Prima, dakwaan Subsida, dakwaan Lebih Subsida tersebut;
 13. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Prima, dakwaan Subsida, dakwaan Lebih Subsida, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;
 14. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka harus dipulihkan, kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
 15. Bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, dengan mengacu kepada pasal 194 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak;
 16. Bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh saksi Lamanda dalam perkara ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
 17. Bahwa setelah memperhatikan permohonan restitusi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pembuktiannya, sedangkan untuk permohonan Kehilangan penghasilan sebesar Rp 640.000,- bukti pendukung fotocopy bukti pembayaran gaji, hanya dibuktikan dengan bukti foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;
 18. Bahwa demikian juga dengan Proyeksi biaya Psikologis dari Nindy Amita, S.Psi Psikolog, berupa rancangan intervensi dan ajukan restitusi berupa; Pendampingan Psikologis (Konseling dan Psikoterapi) dengan prakiraan biaya 11 X Rp 500.000, Psikoedukasi dengan prakiraan biaya 3 X Rp 500.000,-, dan untuk edukasi kepada pihak Fakultas dengan prakiraan 2 X Rp 1.000.000,- juga tidak diikuti dengan pembuktiannya;
 19. Bahwa oleh karena permohonan restitusi ternyata tidak diikuti dengan pembuktian yang sah menurut hukum, tidak ada patokan yang valid bagi majelis untuk mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh saksi Lamanda, sehingga dengan demikian maka majelis berpendapat Permohonan restitusi yang diajukan saksi Lamanda patut dinyatakan tidak dapat diterima;
 20. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Meski alat bukti dan barang bukti sudah dihadirkan dalam persidangan namun hakim masih tidak menganggap alat bukti dan barang bukti diatas untuk menghukum bersalah pelaku sebagaimana dalam pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, dalam kasus ini sipelaku dituntut pidana penjara selama tiga tahun, membebani pelaku untuk membayar Restitusi kepada Lamanda sebesar Rp. 10.772.000 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. Dalam hal ini terdapat kecacatan dalam proses penegakan hukum, dimana sesuai barang bukti yang dikemukakan dalam persidangan, hakim mengadili untuk membebaskan pelaku.

Pasal 1 angka 1 UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai "setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,

seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."

Dari ketentuan tersebut, dapat diambil unsur-unsur yang memenuhi kualifikasi tindakan kekerasan seksual, yakni:

- a. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya;
- b. Dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi;
- c. Secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender; dan
- d. Berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Melihat unsur-unsur dalam UU TPKS tersebut, dengan mengacu kembali pada ringkasan fakta, maka dapat dilihat penjabaran pemenuhan unsur-unsur kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku:

- a. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya: Pada akhir sesi bimbingan korban menanyakan apakah korban boleh salim kepada pelaku, terdakwa menjawab bahwa korban tidak hanya boleh untuk salim, melainkan juga yang lain.
- b. Dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi: Pada saat korban salim, terdakwa maju menggenggam kepala korban (yang merupakan bagian dari tubuh) dan langsung mencium pipi kiri & kening korban serta mengatakan " mana bibir, mana bibir" (yang merupakan bagian dari tubuh dan hasrat seksual). Selain itu, terdakwa juga mengungkapkan "I love you" kepada korban sebanyak dua kali (yang merupakan bagian dari hasrat seksual).
- c. Secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender: Korban merupakan mahasiswa, yang jelas bahwa terdapat ketimpangan relasi antara dirinya dengan terdakwa yang berkedudukan sebagai dosen. Sehingga, korban juga tidak mampu mengutarakan kehendaknya. Adanya paksaan dan ketidakbebasan yang dialami oleh korban terlihat pula pada tindakan korban mendorong perut terdakwa dan mengatakan tidak mau pada saat terdakwa mengatakan "mana bibir, mana bibir"
- d. Berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik: Akibat terjadinya tindakan kekerasan seksual oleh terdakwa, korban mengalami kesengsaraan psikis yang terlihat dari fakta bahwa korban langsung menundukkan kepala dan lemas. Korban juga langsung meninggalkan ruangan terdakwa karena merasakan ketakutan luar biasa dan syok. Pasca kejadian, korban juga mengalami kesengsaraan secara sosial karena dianggap berlebihan atau bahkan dirinya yang menggoda terdakwa.

Dari penjabaran unsur-unsur tersebut, jelas bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan kekerasan seksual. Adapun, secara lebih spesifik, UU TPKS juga mendetailkan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual, yakni:

a) pelecehan seksual; b) eksploitasi seksual; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan aborsi; e) perkosaan; f) pemaksaan perkawinan; g) pemaksaan pelacuran; h) perbudakan seksual; dan/atau i) penyiksaan seksual.

Jika melihat pada jenis-jenis perbuatan tersebut, tindakan terdakwa masuk dalam kualifikasi pelecehan seksual. Adapun, pelecehan seksual mengacu pada Pasal 12 UU TPKS adalah, "kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan restorative justice tindak pidana narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung No 18 tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Bengkalis telah dilakukan dengan langkah-langkah yang ditetapkan dimana adanya barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kualifikasi tersangka, unsur kesalahan (mens rea) pada diri tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, rekomendasi hasil asesmen terpadu.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice adalah karena pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya, belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan, serta keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi

Saran

1. Dengan adanya ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan dikualifikasikannya barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah memudahkan hakim dalam memperoleh keyakinan dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penerapannya masih terdapat hakim yang tidak menggunakan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti seperti pada kasus yang penulis angkat. Namun pada 2 kasus lainnya dengan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual.
2. Dalam pertimbangan hakim pada putusan NO.46/Pid./B/2022/PN.PBR hakim tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini berakibat kepada sulitnya membuktikan tindak pidana kekerasan seksual. Jika merujuk pada unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jelas bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Sesuaikan...

Saran

1. Sebagai bentuk apresiasi disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kedepannya diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih maksimal lagi agar tidak ada lagi korban kekerasan seksual yang kesulitan dalam membuktikan adanya tindak kekerasan seksual.
2. Disarankan kedepannya hakim menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperoleh keyakinan dari barang bukti yang diajukan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Karim nasution. 1976. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana. Jakarta: Kejaksaan Agung R.I.
- Andi Hamzah. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2006. KUHP dan KUHP. Cet. 13. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2017. Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2016. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Penerbit Bina Aksara.
- Eddy OS. Hiarieej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Koesparmono Irsan. 2007. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Grafika.
- Laurensius Arliman. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan* (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan). Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Chalia Indonesia.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Munir fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradyna paramita.
- Romli Atmasasmitha. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Jurnal/ Skripsi/ Tesis**
- Fahrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis UNAJA*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Richard Lokas. "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex et Societatis*. Vol. III/No. 9/Okt/2015.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8 No 3. 2008.
- Siti Merida Hutagalung. "Penegakan hukum di Indonesia, Apakah Indonesia Negara Hukum". *Sociae Polites*. 2011.
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Vol. 7. No. 2. 2022.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan, Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Website**
- <https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>